

SEKOLAH ADVOKASI PEMUDA PAPUA (SA PAPUA) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERILAKU RADIKALISME BERBASIS SARA

Aldilla Yulia WS., Muchammad Farid, Sofyan Muhamad, Yoga Adriyan, Munzir, Rahmat
Hidayat, Adinda Shofia

Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

aldilla.wiellys@gmail.com, faridmuchammad7@gmail.com, sofyanmip48@gmail.com,
sadegayoga29@gmail.com, munzirpahlevima@gmail.com, rahmat.dyt09@gmail.com,
adindashofia@unimudasorong.ac.id

Abstrak

Tujuan dari program pengabdian kepada masyarakat yang berjudul “Sekolah Advokasi Pemuda Papua (SA PAPUA) Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Radikalisme Berbasis SARA” di Kampung Warmon Kokoda adalah sebagai berikut: Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam bidang advokasi guna mencegah perilaku radikalisme berbasis sara. Meredam dan menghilangkan perilaku masyarakat yang mengarah kepada radikalisme dan teror. Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat di Kampung Warmon Kokoda dilakukan selama tiga hari dengan melibatkan berbagai macam pihak mulai dari tim penyusunan modul, narasumber, dan mahasiswa. Permasalahan yang dihadapi oleh komunitas yang berada pada kerentanan adalah tingginya angka prevalensi kriminalitas dan kekerasan yang dapat mengarah pada perilaku radikalisme. Untuk melindungi komunitas dari kecenderungan terlibat pada perilaku tersebut dibutuhkan pendekatan yang bersifat masif dan terukur. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan sekolah advokasi pada masyarakat lokal mengenai pencegahan perilaku radikalisme. Pemuda Kampung Warmon memiliki peranan penting dalam mencegah atau justru menguatkan perilaku radikalisme. Oleh karena itu, pemuda dan pemudi komunitas setempat menjadi target upaya prevensi sekaligus menjadi ujung tombak keberhasilan program prevensi perilaku radikalisme berbasis SARA. Hasil Pengabdian diperoleh dengan melakukan sekolah advokasi, kesadaran masyarakat mengenai hukum dan konsekuensinya menjadi lebih baik. Secara sosial, program ini mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga dalam pencegahan perilaku radikalisme berbasis SARA yang ditunjukkan dengan antusiasnya warga mengikuti kegiatan. Manfaat sosial lainnya adalah terbentuknya konformitas dan kohesi sosial di kalangan warga pada pencegahan perilaku radikal dan kekerasan lainnya. Sesuai dengan road map program pengabdian yang telah kami laksanakan di Kampung Warmon Kokoda Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong mengenai Sekolah Advokasi Pemuda Papua (SA PAPUA) maka hasil yang diperoleh adalah peningkatan kemampuan advokasi masyarakat yang menunjang dalam strategi penyelesaian masalah baik secara vertikal maupun horizontal sebagai upaya pencegahan perilaku radikal berbasis SARA.

Kata Kunci : Sekolah Advokasi, Pencegahan Perilaku Radikalisme.

Abstract

The objectives of the community service program entitled "Papua Youth Advocacy School (SA PAPUA) as an Effort to Prevent SARA-Based Radicalism" in Warmon Kokoda Village are as follows: Increase public understanding in the field of advocacy to prevent racial-based radicalism. Dampening and eliminating public behavior that leads to radicalism and terror. The implementation of the community service program in Warmon Kokoda Village was carried out for three days by involving various parties ranging from the module preparation team, resource

persons, and students. The problem faced by communities that are at vulnerability is the high prevalence of crime and violence that can lead to radicalism. To protect the community from the tendency to engage in such behavior requires a massive and measurable approach. One of the efforts made is by advocating schools to local communities regarding the prevention of radicalism. The youth of Kampung Warmon have an important role in preventing or actually strengthening radicalism. Therefore, the youth and women of the local community are the targets of prevention efforts as well as spearhead the success of the SARA-based radicalism prevention program. The results of the service are obtained by conducting advocacy schools, public awareness about the law and its consequences is getting better. Socially, this program is able to increase citizens' awareness and participation in preventing SARA-based radicalism, which is shown by the enthusiasm of the residents in participating in the activities. Another social benefit is the formation of conformity and social cohesion among citizens in preventing radical behavior and other violence. In accordance with the road map of the service program that we have carried out in Warmon Kokoda Village, Mayamuk District, Sorong Regency regarding the Papuan Youth Advocacy School (SA PAPUA), the results obtained are an increase in community advocacy skills that support problem solving strategies both vertically and horizontally as prevention efforts. SARA-based radical behavior.

Keywords: Advocacy School, Prevention of Radicalism Behavior.

1. Pendahuluan

Pengembangan pola pikir manusia sejatinya akan terus berkembang sesuai dengan tingkat pemahaman dan wawasan. Peningkatan wawasan berfikir tentu berpengaruh secara masif terhadap pola perilaku manusia dalam bertindak dan mengambil keputusan. Perilaku manusia yang didasari dengan kedalaman berfikir dan juga keluasan pemahaman dapat mengurangi resiko-resiko buruk terutama dalam berperilaku.

Perilaku yang tanpa didasari pemahaman dan wawasan memadai dalam merekam informasi yang ditemuinya berpotensi akan mengakibatkan dampak buruk dan negatif yang bahkan menjurus pada pelaku teror dan radikal. Jika persoalan tersebut dibiarkan maka lambat laun akan mengganggu keutuhan dan kedaulatan khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Indonesia sendiri merupakan negara yang heterogen mulai dari suku, ras, agama dan bahkan pandangan politik. Hal ini yang menyebabkan tidak dapat dilepaskan dari isu-isu terorisme dan radikalisme. Sejarah mengungkapkan cerita teror dan perilaku radikalisme telah terjadi dimulai dari peristiwa G30S-PKI kurang lebih 56 tahun yang lalu hingga saat ini berkembang menjadi kejahatan menggunakan peledak yang kita kenal dengan bom bunuh diri. Bahkan

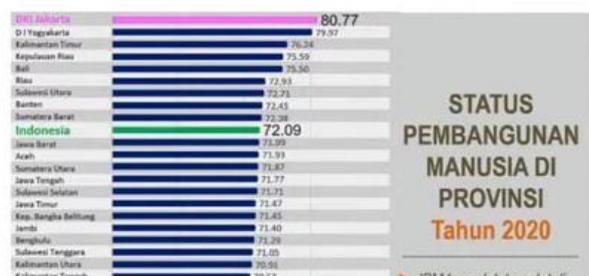
dipertajam dengan aksi gerakan kemerdekaan atau referendum di berbagai daerah seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Republik Maluku Selatan (RMS), dan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Perbuatan teror yang merujuk pada perilaku kekerasan terhadap kaum minoritas masih sering kita jumpai baik dalam berita-berita nasional maupun daerah. Radikalisme mempunyai hubungan yang erat dengan terorisme dan keduanya merupakan ancaman nyata yang saat ini dihadapi oleh pemerintah.

Radikalisme dalam arti bahasa berarti paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis dan revolusioner. Namun, bisa juga berarti, konsep sikap jiwa dalam mengusung perubahan. Sementara itu Radikalisme menurut Wikipedia adalah suatu paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan caracara kekerasan. Namun bila dilihat dari sudut pandang keagamaan dapat diartikan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi, sehingga tidak jarang penganut dari paham radikal tersebut menggunakan kekerasan kepada orang yang berbeda paham/aliran untuk mengaktualisasikan paham keagamaan yang dianut dan dipercayainya untuk diterima secara paksa (Khamid & Surakarta,

2016).

Khususnya di Papua perkembangan perilaku radikalisme yang dapat kita jumpai seperti kekerasan, pemalangan jalan, dan perusakan fasilitas umum yang biasanya terjadi karena konflik sara dan isu-isu nasional, yang salah satunya baru kemarin terjadi hampir diseluruh wilayah Papua. Hal ini tidak hanya merugikan secara material tetapi juga memakan korban nyawa manusia. Menurut (Suwadi:2019) kerusuhan pada bulan September di Jayapura menyebabkan 4 tewas, 3 dari sipil satu orang lainnya aparat TNI. Sementara, kerusuhan di Wamena menyebabkan 33 orang warga sipil tewas. Sebagian besar tewas karena terbakar bersama rumahnya. Belum lagi korban luka yang tercatat lebih dari 70 orang. Selain dari sisi korban jiwa, kerugian secara materil dalam kerusuhan di Wamena tak sedikit. 224 mobil roda 6 dan 4 hangus, 150 motor, 465 ruko hangus, dan 165 rumah dibakar (Robertus Bellarminus;2019).

Hal tersebut juga diperburuk dengan tingkat pendidikan dan kesejahteraan di Papua yang sebagian besar masih dibawah standar nasional. Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Papua dan Papua Barat menempati tempat terendah dalam Indeks Pembangunan Manusia yang dikualifikasikan secara nasional.



Gambar 1.1. Status Pembangunan Manusia di Provinsi Tahun 2020

Sumber:<http://papuabaratnews.co/editorial/2020-ipm-papua-barat-terendah-kedua-di-indonesia/>

Jika perilaku tersebut terus dibiarkan secara tidak langsung akan mengganggu ketertiban umum dan dapat dikategorikan sebagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) terhadap negara. Peristiwa-peristiwa yang selama ini terjadi perlu ditangani dengan sebuah program yang sangat dekat dengan pengaplikasiannya kepada warga masyarakat khususnya orang asli papua (OAP). Oleh karena itu, kami mengusulkan program pengabdian kepada masyarakat berupa Sekolah Advokasi Pemuda Papua (SA PAPUA). Upaya tersebut dilakukan agar meminimalisir perilaku radikalisme yang berbasis pada sara. SA PAPUA mengoptimalkan peran pemuda dalam upaya membangun wadah yang mampu mengadvokasi isu-isu atau kebijakan khususnya yang bersentuhan langsung terhadap masyarakat khususnya OAP.

Dengan istilah yang sederhana, advokasi merupakan tindakan memengaruhi atau mendukung sesuatu atau seseorang. Ketika kita

bicara advokasi dan lobi dalam konteks kata lain, sedekah merupakan tindakan yang hanya organisasi pengusaha, secara umum kita akan menyelesaikan akibat, bukan sebab. Demikian berpikir tentang advokasi kebijakan publik. halnya dengan masalah-masalah lain yang Seperti aksi-aksi yang dirancang untuk menyangkut harkat hidup orang banyak, memengaruhi hukum, regulasi, keputusan khususnya masalah-masalah yang terkait dengan pengadilan, juga sikap dan pendekatan umum keadilan sosial. Advokasi juga merupakan partai politik (Tiga, n.d.).

Advokasi adalah usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap-maju (incremental) (Juditha, Besar, Komunikasi, & Makassar, 2019). Advokasi sendiri jika kita mengambil dari bahasa Inggris, maka to advocate tidak hanya berarti “membela” (to defend), tetapi juga bisa berarti ‘memajukan’ atau ‘mengemukakan’ (to promote) yang dengan kata lain, juga berarti berusaha ‘menciptakan’ (to Create) yang baru, yang belum ada (lihat antara lain, The Heritage Dictionary of Current English, Oxford, 1958). Dengan kata lain, juga berarti melakukan ‘perubahan’ (to change) secara terorganisir dan sistematis. Dengan kata lain dapat dimaknai sebagai aktifitas untuk memperjuangkan sesuatu untuk mencapai tujuan. Program ini dilakukan dengan memperkenalkan upaya yang diwadahi dalam perilaku bernegara yang baik.

Membantu orang yang sedang dalam kesulitan/kemiskinan dengan sedekah memang tidak salah, bahkan dianjurkan. Namun tindakan itu tidak strategis karena tidak dapat menyelesaikan persoalan kemiskinan. Dengan

langkah untuk merekomendasikan gagasan kepada orang lain atau menyampaikan suatu isu penting untuk dapat diperhatikan masyarakat serta mengarahkan perhatian para pembuat kebijakan untuk mencari penyelesaiannya serta membangun dukungan terhadap permasalahan yang diperkenalkan dan mengusulkan bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut (Zulyadi, Sosial, & Inggris, 2009).

Terselenggaranya SA PAPUA diharapkan mampu menjembatani opini atau kehendak masyarakat khususnya OAP terkait dengan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. Serta dapat pula sebagai upaya filterisasi terhadap berita atau isu-isu hoaks yang saat ini mudah dijumpai di beberapa media sosial yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dan ingin memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan hasil observasi dan diskusi yang mendalam bersama Kepala Kampung, Tokoh Masyarakat, dan Pemuda, ditemukan beberapa permasalahan yang sangat fundamental dan krusial mengenai perilaku-perilaku radikal yang dilakukan warga masyarakat selama ini, dan perlu segera diselesaikan. Adapun permasalahan yang dimunculkan sebagai

berikut: Tingkat literasi masyarakat yang cenderung rendah mengakibatkan informasi yang diperoleh dari media, terserap tanpa filter atau dikonfirmasi, Pendidikan masyarakat yang relatif terbatas dan rendah dan Tingkat kesejahteraan masyarakat yang relatif tidak merata.

2. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Sekolah Advokasi dilakukan secara luring di Kampung Warmon Kokoda dengan pertimbangan karena di kampung tersebut belum ditemukan kasus covid 19 dan pelaksanaan tetap memenuhi protokol kesehatan berupa masker dan hand sanitizer yang dibagikan pada semua peserta kegiatan termasuk panitia pelaksana.

Secara lebih detail, Strategi dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat Sekolah Advokasi Pemuda Papua (SA PAPUA) Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Radikalisme Berbasis SARA diuraikan sebagai berikut:

1. Persiapan

Dalam tahapan persiapan pengabdian kepada masyarakat Sekolah Advokasi Pemuda Papua (SA PAPUA) Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Radikalisme Berbasis SARA di Kampung Kokoda, persiapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan modul yang digunakan selama sosialisasi yaitu modul pengantar Sekolah Advokasi Pemuda

Papua (SA PAPUA) oleh tim

- b. Penyusunan soal pretest dan posttest untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman peserta sosialisasi.
- c. Koordinasi kepada Kepala Kampung Kokoda dalam rangka program pengabdian kepada masyarakat Sekolah Advokasi Pemuda Papua (SA PAPUA) Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Radikalisme Berbasis Sara” di Kampung Kokoda.
- d. Penyiapan perlengkapan untuk melaksanakan kegiatan Sekolah Advokasi Pemuda Papua (SA PAPUA) Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Radikalisme Berbasis Sara” di Kampung Kokoda.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat di Kampung Warmon Kokoda dilakukan selama tiga hari dengan melibatkan berbagai macam pihak mulai dari tim penyusunan modul, narasumber, dan mahasiswa.

3. Pendampingan

Pendampingan kepada warga masyarakat Kampung Warmon Kokoda dilakukan secara berkala dengan selalu berkordinasi dengan pihak aparaturnya kampung. Pendampingan yang dilakukan juga mengarah pada implementasi upaya advokasi masyarakat terhadap permasalahan di wilayah sekitar kampung dan masyarakat.

Upaya pemdampingan tetap dilakukan pada kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui dengan mencanangkan Kampung Warmon keefktifan dan efisiensi kegiatan yang dilakukan Kokoda menjadi Desa Sadar Hukum sesuai oleh institusi dan mitra pelaksanaan kegiatan.

standar kriteria Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) adalah tabel pelaksanaan program kemitraan Republik Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, berikut

4. Pelaporan

Pelaporan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat Sekolah Advokasi Pemuda Papua (SA PAPUA) sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Radikalisme Berbasis SARA dilakukan sebagai berikut: Pelaporan pengabdian akan dilakukan pada akhir Bulan Desember 2021, Pada akhir kegiatan pelaksanaan pengabdian dilakukan juga pembuatan video dan Pembuatan draf jurnal ilmiah dan draf berita pada media massa.

5. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi (Monev) ini dilakukan oleh Tim Internal dan Eksternal. Tim Internal yang berasal dari Perguruan Tinggi Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong yakni Lemabaga Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Masyarakat (LP3M). Sedangkan Tim Eksternal terdiri dari Aparatur Kampung Warmon Kokodan dengan melibatkan Babinsa dan Babinkamtibmas. Sehingga dengan dilakukannya monev ini dapat diketahui kekurangan dan kelemahanya untuk dapat dievaluasi dalam tahap berikutnya.

Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi



Gambar II. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Sekolah Advokasi Pemuda Papua (SA PAPUA)

Pelaksanaan program pengabdian tersebut diuraikan secara detail, sebagai berikut:

a. Pelaksanaan hari pertama

Setelah melakukan koordinasi dengan pihak aparaturnya kampung, pada kegiatan awal dilakukan dengan melakukan pretest kepada warga masyarakat terkait pemahaman dan wawasan mengenai advokasi. Kegiatan ini dilakukan guna mengukur tingkat pengetahuan warga masyarakat mengenai pemahaman advokasi.

Materi pertama dalam kegiatan pengabdian sekolah advokasi pemuda Papua berupa pengantar advokasi. Pada materi tersebut diberikan pemahaman secara baik kepada

masyarakat tentang advokasi dan upaya advokasi dalam menyelesaikan masalah baik secara vertikal maupun horizontal.

b. Pelaksanaan hari kedua

Pada hari kedua materi yang disajikan narasumber mengenai non-litigasi, dalam strategi advokasi dikenal 2 macam cara yakni litigasi dan non litigasi. Strategi non litigasi dalam hukum juga dikenal sebagai upaya advokasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam mengawal hal-hal yang dirasa tidak adil terhadap kebijakan pemerintah.

Pada sesi berikutnya dihari kedua materi yang disampaikan oleh narasumber mengenai litigasi. Pengertian litigasi sendiri adalah upaya penyelesai masalah melalui jalur hukum atau persidangan, biasanya pada perkara-perkara tersebut didampingi oleh penasehat hukum atau kuasa hukum.

Sesi terakhir pada hari kedua disampaikan materi tentang manajemen konflik. Peserta diberikan pemahaman tentang tersinggungan perilaku yang berujung pada konflik-konflik sosial masyarakat. Pemahaman yang diberikan diharapkan dapat diimplementasikan masyarakat dalam meremdam konflik yang terjadi baik secara internal ataupun eksternal.

c. Pelaksanaan hari ketiga

Pada hari ketiga dan merupakan penutup serangkaian kegiatan sekolah advokasi pemuda Papua, materi terakhir yang diberikan

adalah berkaitan dengan strategi mediasi. Upaya ini dilakukan semata-mata untuk meningkatkan respon warga masyarakat dalam menyikapi persoalan yang terjadi dengan tetap mengupayakan jalan keluar win-win solution.

Kegiatan diakhiri dengan melakukan postest kembali kepada peserta guna mengukur tingkat kemampuan dalam memahami materi yang diberikan oleh para narasumber.



Gambar 3.1 Sekolah Advokasi SA PAPUA

Sesuai dengan road map program pengabdian yang telah kami laksanakan di Kampung Warmon Kokoda Distrik Mayamuk

Kabupaten Sorong mengenai Sekolah Advokasi Pemuda Papua (SA PAPUA) maka hasil yang diperoleh adalah peningkatan kemampuan advokasi masyarakat yang menunjang dalam strategi penyelesaian masalah baik secara vertikal maupun horizontal sebagai upaya pencegahan perilaku radikal berbasis sara.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini secara umum memiliki luaran yang dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Rencana Target Capaian Luaran

No.	Jenis Luaran	Indikator Capaian
Luaran Wajib		
1.	Publikasi ilmiah pada Jurnal ber ISSN/ Prosiding jurnal nasional	Draf
2.	Publikasi pada media massa cetak/online/ <i>repository</i> Perguruan Tinggi	Draf
4.	Peningkatan pengetahuan dan pemahaman dikalangan masyarakat mengenai advokasi.	Penerapan

	(mekanisasi, IT, dan manajemen).	
5.	Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya sosialpolitik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan)	Draf
6.	Video pelaksanaan kegiatan pengabdian	Ada
Luaran Tambahan		
7.	Publikasi di jurnal internasional	Tidak ada
8.	Jasa, rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/ barang	Tidak ada
9.	Inovasi baru TTG	Tidak ada
10.	Hak kekayaan intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak Cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain Produk Industri,	Draf
11.	Buku ber ISBN	Tidak ada

3.2 Manfaat dan Dampak Pengabdian

a. Dampak Sosial Ekonomi

Kejahatan Radikalisme sudah menjadi ancaman nyata bagi masyarakat di wilayah Papua. Indonesia adalah salah satu negara yang rentan terjadi radikalisme karena banyaknya keberagaman suku budaya dan agama gerakan radikalisme memberikan dampak bagi keberlangsungan sosial, ekonomi dan budaya dalam masyarakat. Radikalisme dapat menimbulkan permasalahan seperti kekacauan dan masyarakat yang terjadi di wilayah Papua, maka selalu waspada terkait dengan suatu sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab seorang warga Negara terhadap kelangsungan kehidupan Nasionalnya, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dari suatu ancaman.

Dengan memperhatikan dampak dan gerakan radikalisme dan teror yang sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat apalagi negara Indonesia ini merupakan negara multikultural maka gerakan radikalisme ini akan secara tidak langsung akan berpengaruh pada tatanan ekonomi sosial masyarakat.

Hal ini juga terkait dengan pemahaman literasi di masyarakat yang masih mudah terpengaruh berita-berita hoaks sehingga mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Seorang dikatakan literat jika ia sudah bisa memahami sesuatu karena membaca informasi yang tepat dan melakukan sesuatu berdasarkan pemahamannya terhadap isi

bacaan tersebut (Juditha et al., 2019). Maka dengan adanya pemahaman literasi yang baik mengakibatkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dapat stabil dengan berkurangnya tindakan kriminal dan masyarakat saling bekerjasama satu sama lain untuk menebarkan kebaikan dan manfaat.

b. Dampak dan Kontribusi pada Sektor lain

Pengabdian Masyarakat yang telah dilakukan memiliki kontribusi bagi beberapa instansi dan institusi terkait, yaitu:

- 1) Unsur Institusi Kepolisian. Sebagai institusi penegak hukum di Indonesia, Pengabdian Masyarakat ini memiliki kontribusi yang sangat besar sebagai landasan dasar hukum untuk penyelesaian permasalahan di wilayah yang memiliki tingkat konflik yang sangat tinggi. Peran Kepolisian Republik Indonesia bisa dirasakan langsung dengan hadirnya satuan kepolisian Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Bhabinkamtibmas) di masyarakat. Bhabinkamtibmas bisa langsung merespon cepat dengan adanya data dan landasan dasar yang berasal dari laporan pengabdian masyarakat tersebut.
- 2) Unsur Instansi Tentara Nasional Indonesia. Sebagai instansi garda terdepan pelindung Negara Kesatuan Republik Indonesia baik dari dalam maupun luar, laporan Pengabdian Masyarakat ini memiliki peran yang strategis dalam menentukan daerah rawan konflik (peta konflik) di seluruh Indonesia. Peran Bintara pembina desa (Babinsa) sangat

- penting dalam deteksi dini daerah rawan konflik dan daerah konflik. Data yang dihasilkan di dalam laporan ini, bisa dijadikan bahan Analisis strategis dalam menentukan arah kebijakan pertahanan yang bersifat ke dalam.
- 3) Unsur Pemangku adat. Laporan Pengabdian Masyarakat ini bagi para unsur pemangku adat memiliki kontribusi sebagai bahan referensi dan sumber literasi yang baik, karena sudah dijelaskan bagaimana cara mengatasi konflik tanpa harus menimbulkan kerugian moral dan materil.
 - 4) Unsur Instansi Pemerintahan. Laporan Pengabdian Masyarakat ini bagi unsur instansi pemerintahan khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) wilayah Papua Barat bisa dijadikan sebuah data kualitatif dan kuantitatif terkait pembagian daerah berdasarkan pemicu konflik yang bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
 - 5) Unsur Institusi Pemerintah. Laporan Pengabdian Masyarakat ini bagi unsur institusi pemerintah khususnya Badan Intelijen Negara (BIN) dapat dijadikan sebuah big data pemetaan wilayah rawan konflik dan wilayah konflik. Big Data ini berfungsi sebagai upaya deteksi dini terhadap sebuah konflik agar dapat ditanggulangi sejak dini dan dapat digunakan sebagai upaya mitigasi konflik.
 - 6) Unsur Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Laporan Pengabdian Masyarakat ini bagi unsur Pemerintah Provinsi dan Kabupaten bisa dijadikan bahan tolak ukur bersama dalam membangun sinergitas kebijakan penanganan wilayah rawan konflik dan daerah konflik.
 - 7) Unsur Organisasi Keagamaan. Laporan Pengabdian Masyarakat ini bagi unsur organisasi keagamaan dapat dijadikan bahan Analisis dalam penerapan program moderasi dan toleransi keagamaan, dapat menebar kemanfaatan ditengah kemajemukan di Indonesia, dan dapat mendukung upaya pemerintah baik pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas toleransi beragama.

3.3 Hambatan dan Tindak Lanjut

a. Hambatan

Selama berlangsungnya proses pengabdian masyarakat yang bertajuk “Sekolah Advokasi Pemuda Papua (SA PAPUA) Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Radikalisme Berbasis SARA” di Kampung Kokoda, terdapat 3 (Tiga) faktor yang menjadi Kendala/Hambatan. Adapun faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapatnya pemahaman atau pandangan hukum adat yang masih tergolong sangat tinggi ketimbang UU positif Indonesia. Sehingga pemateri harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan isi dari materi yang disampaikan.
- 2) Masih terdapat beberapa masyarakat yang memiliki kemampuan terbatas dalam

membaca dan menulis.

- 3) Kendala yang berkaitan dengan teknis, lebih kepada akses menuju lokasi. Dikarenakan sebagian rutenya tidak efektif bila dilalui kendaraan roda empat, sehingga dibutuhkan waktu lebih lama untuk melakukan persiapan kegiatan

b. Tindak Lanjut

Tindak lanjut kegiatan pengabdian ini adalah dengan tetap melakukan pendampingan pada pemuda dan pemudi kampung Kokoda Warmon. Selain itu, advokasi dan diseminasi program pada RT/RW lainnya yang memiliki karakteristik yang serupa, sehingga program pengabdian yang telah dilaksanakan tetap memiliki sustainability yang baik kedepannya pada kampung Warmon dan kampung-kampung lainnya.

Kesimpulan

Permasalahan yang dihadapi oleh komunitas yang berada pada kerentanan adalah tingginya angka prevalensi kriminalitas dan kekerasan yang dapat mengarah pada perilaku radikalisme. Untuk melindungi komunitas dari kecenderungan terlibat pada perilaku tersebut dibutuhkan pendekatan yang bersifat masif dan terukur. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan sekolah advokasi pada masyarakat lokal mengenai pencegahan perilaku radikalisme.

Pemuda Kampung Warmon memiliki

peranan penting dalam mencegah atau justru menguatkan perilaku radikalisme. Oleh karena itu, pemuda dan pemudi komunitas setempat menjadi target upaya preventi sekaligus menjadi ujung tombak keberhasilan program preventi perilaku radikalisme berbasis SARA.

Melalui sekolah advokasi yang dilakukan, kesadaran masyarakat mengenai hukum dan konsekuensinya menjadi lebih baik. Secara sosial, program ini mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga dalam pencegahan perilaku radikalisme berbasis SARA yang ditunjukkan dengan antusiasnya warga mengikuti kegiatan. Manfaat sosial lainnya adalah terbentuknya konformitas dan kohesi sosial di kalangan warga pada pencegahan perilaku radikal dan kekerasan lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami tujukan kepada seluruh Sivitas Akademika Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong yang telah memfasilitasi kegiatan Pengabdian, Masyarakat Kampung Warmon Kokoda, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong , Mahasiswa dan Pematari yang telah berpartisipasi melakukan kegiatan pengabdian masyarakat.

Daftar Pustaka

- Juditha, C., Besar, B., Komunikasi, P., & Makassar, B. (2019). No Title, (25).
- Khamid, N., & Surakarta, D. I. (2016). Bahaya Radikalisme terhadap NKRI, *1*, 123–152.
- Tiga, P. (n.d.). *No Title* (2006th ed.). JAKARTA:

anggota fakultas Universitas Organisasi-organisasi Internasional Jenewa MBA untuk Biro Aktivitas Pengusaha Organisasi Perburuhan Internasional. Retrieved from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/documents/publication/wcms_597486.pdf

Yulia, A., Sutikno, W., Ardiansyah, F., & Khasanah, U. (2021). Membangun Nilai Integritas Melalui Kantin Kejujuran Di SMK Muhammadiyah Aimas Kabupaten Sorong, *4*(2), 25–33.

Zulyadi, T., Sosial, P. A., & Inggris, D. B. (2009). Advokasi sosial. *Al-Bayan*, *21*(Advokasi Sosial), 63–76.

<https://regional.kompas.com/read/2019/12/30/07000031/kaleidoskop-2019--kerusuhan-di-papua-buntut-kasus-rasial-dan-hoaks?page=all>

<http://papuabarnews.co/editorial/2020-ipm-papua-barat-terendah-kedua-di-indonesia/>